



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR	IV
KATA PENGANTAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
C. Isu-isu Strategis	10
D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	13
E. Sistematika Penulisan	20
F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat	23
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
C. Perjanjian Kinerja	27
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran	47
C. Inovasi.....	51
D. Penghargaan.....	52
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Rekomendasi	56
LAMPIRAN	58
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026.....	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Rumusan Permasalahan : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).....	11
Tabel 1.2 : Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 1.3 : Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.4 : Data Aset Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2025...	15
Tabel 1.5 : Ringkasan Perubahan DPPA dan Belanja Daerah SKPD TA. 2025 .	19
Tabel 1.6 : Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar	21
Tabel 2.1 : Tujuan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal 2021-2026	24
Tabel 2.2 : Tujuan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal 2025-2029	25
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.....	26
Tabel 2.4 : Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025	27
Tabel 2.6 : Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	28
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026).....	32
Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	32
Tabel 3.3 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Renstra 2021-2026).....	33
Tabel 3.4 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Renstra 2025-2029).....	35
Tabel 3.5 : Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	37
Tabel 3.6 : Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39
Tabel 3.7 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	40
Tabel 3.8 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah	43
Tabel 3.9 : Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	44
Tabel 3.10 : Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Proses Bisnis Level 0.....	4
Gambar 1.2 : Peta Proses Bisnis Level 1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	5
Gambar 1.3 : Peta Proses Bisnis Level 1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5
Gambar 1.4 : Peta Proses Bisnis Level 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6
Gambar 1.5 : Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	7

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Nomor : 050 / 0042 / 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, 22 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dilatarbelakangi oleh kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjamin terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran. Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dasar yang menjamin rasa aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama keberlangsungan pembangunan daerah.

Secara kelembagaan, Satpol PP dan Damkar Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan ketentuan tersebut, Satpol PP dan Damkar Kendal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Keberadaan Satpol PP dan Damkar Kendal memiliki peran strategis dalam mendukung kepala daerah melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara konsisten, profesional, dan berkeadilan, sekaligus penyelenggaraan pelayanan penanggulangan kebakaran yang cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya dinamika sosial, pertumbuhan wilayah, serta kompleksitas aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum maupun kejadian kebakaran.

Selain itu, peningkatan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda menuntut penguatan kelembagaan Satpol PP dan Damkar Kendal yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, pembentukan Satpol PP dan Damkar Kendal merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pelayanan dasar, serta mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tangguh terhadap risiko kebakaran.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan Satpol PP dan Damkar
 - a. Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Satpol PP dan Damkar
 - a. Membantu Bupati melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi Satpol PP dan Damkar
 - a. Perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran;
 - f. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran

B. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1. Mandat Kinerja

Mandat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan perangkat daerah dan pembagian urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Satpol PP dan Damkar Kendal mempunyai mandat untuk menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Mandat kinerja tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mandat ini dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta rencana hasil kerja yang terukur, berjenjang, dan selaras dengan dokumen perencanaan kinerja daerah.

2. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis Satpol PP dan Damkar Kendal disusun sebagai instrumen manajerial untuk menggambarkan keterkaitan dan alur kerja seluruh aktivitas organisasi dalam rangka menghasilkan layanan publik sesuai mandat kinerja. Penyusunan peta proses bisnis tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yang menekankan pada keterpaduan proses, kejelasan peran, serta orientasi pada pencapaian kinerja.

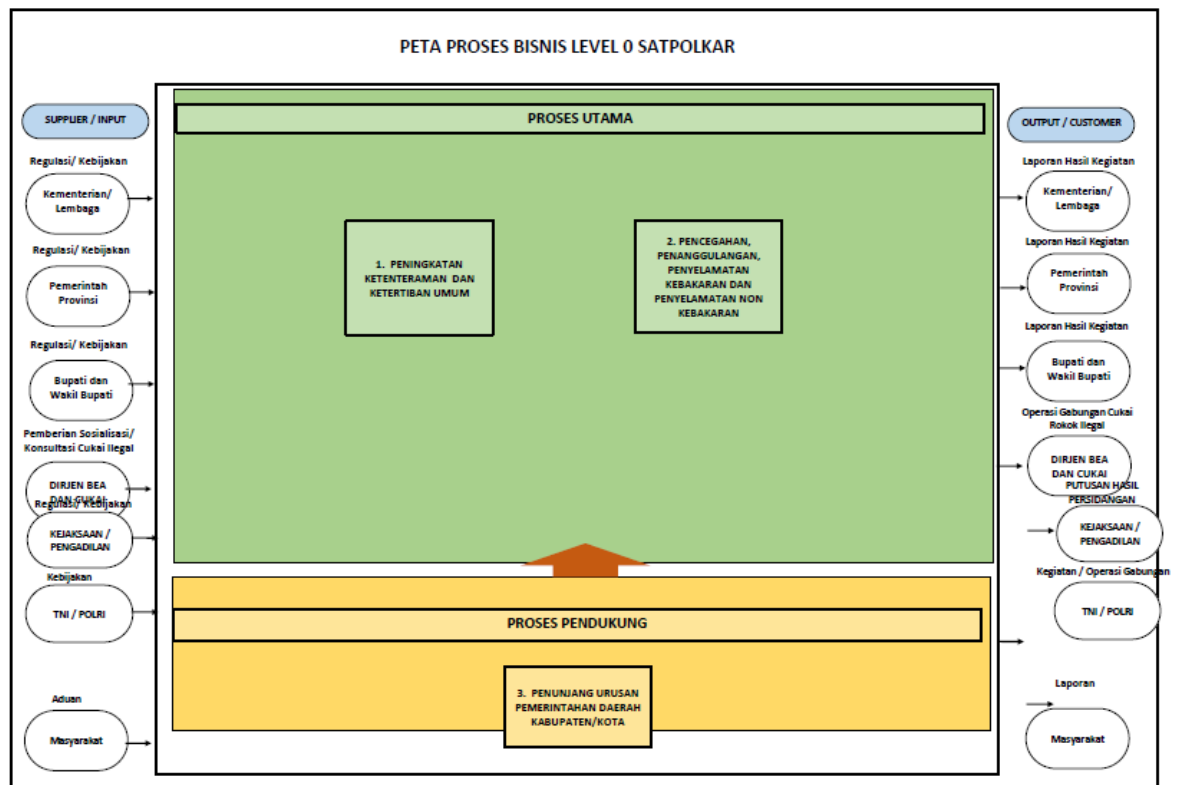
Dalam peta proses bisnis Satpol PP dan Damkar Kendal, proses inti meliputi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Proses pendukung mencakup pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, serta sistem

informasi. Sementara itu, proses manajerial diarahkan pada fungsi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Penerapan peta proses bisnis ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses kerja berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar dalam penguatan keterkaitan antara proses bisnis, struktur organisasi, dan kinerja yang dihasilkan.

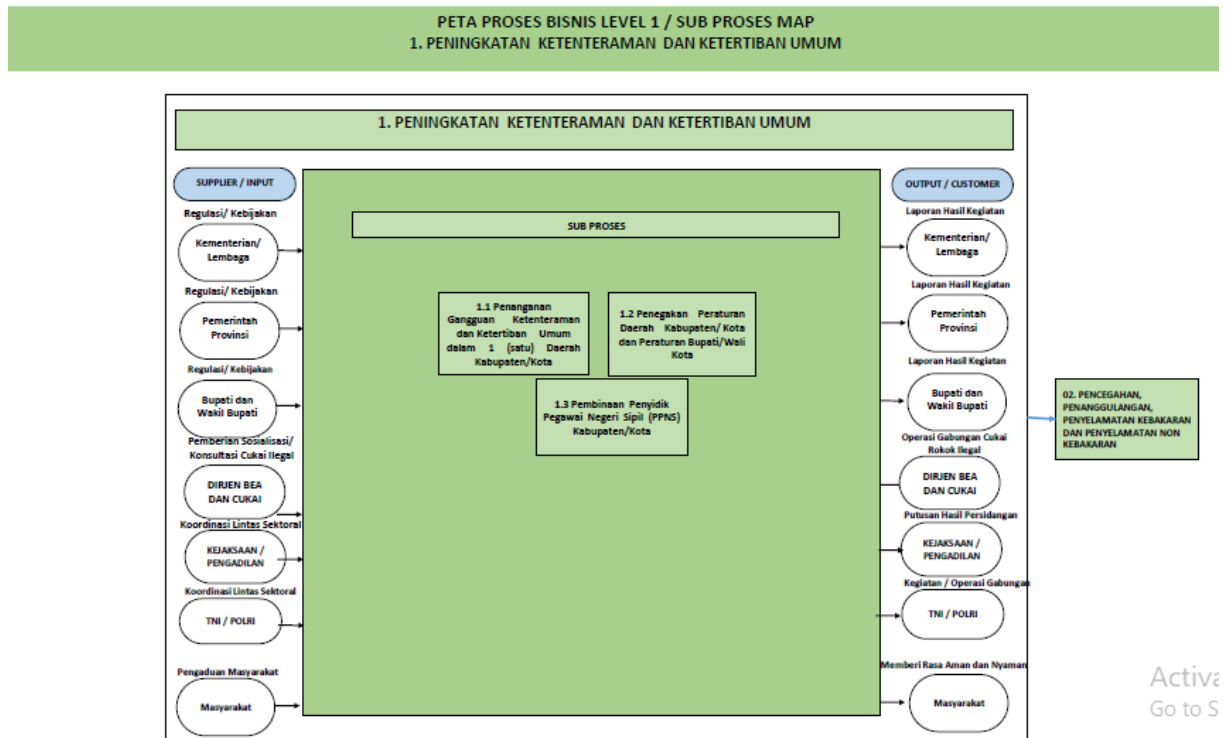
Adapun mandat kinerja peta proses bisnis pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal tergambarkan sebagaimana dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Peta Proses Bisnis Level 0

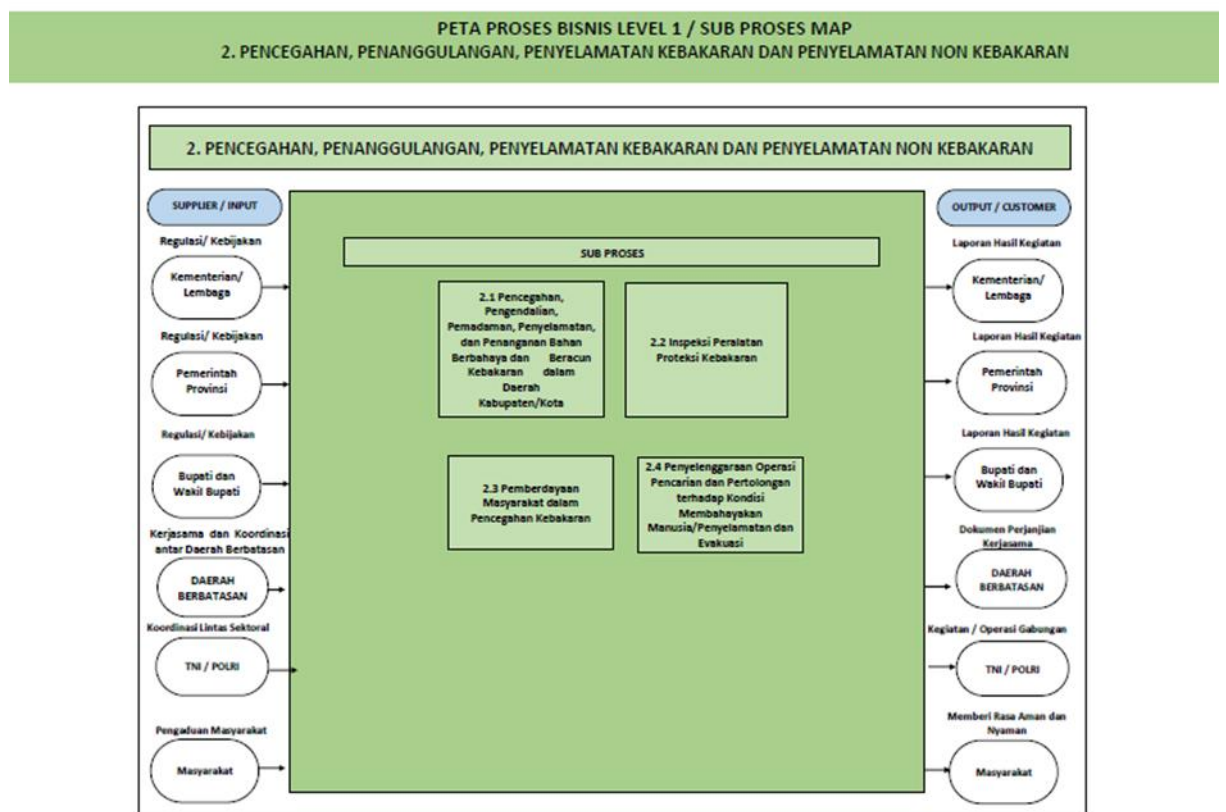


Peta Proses Bisnis Level 0 (Peta Proses) ini merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.

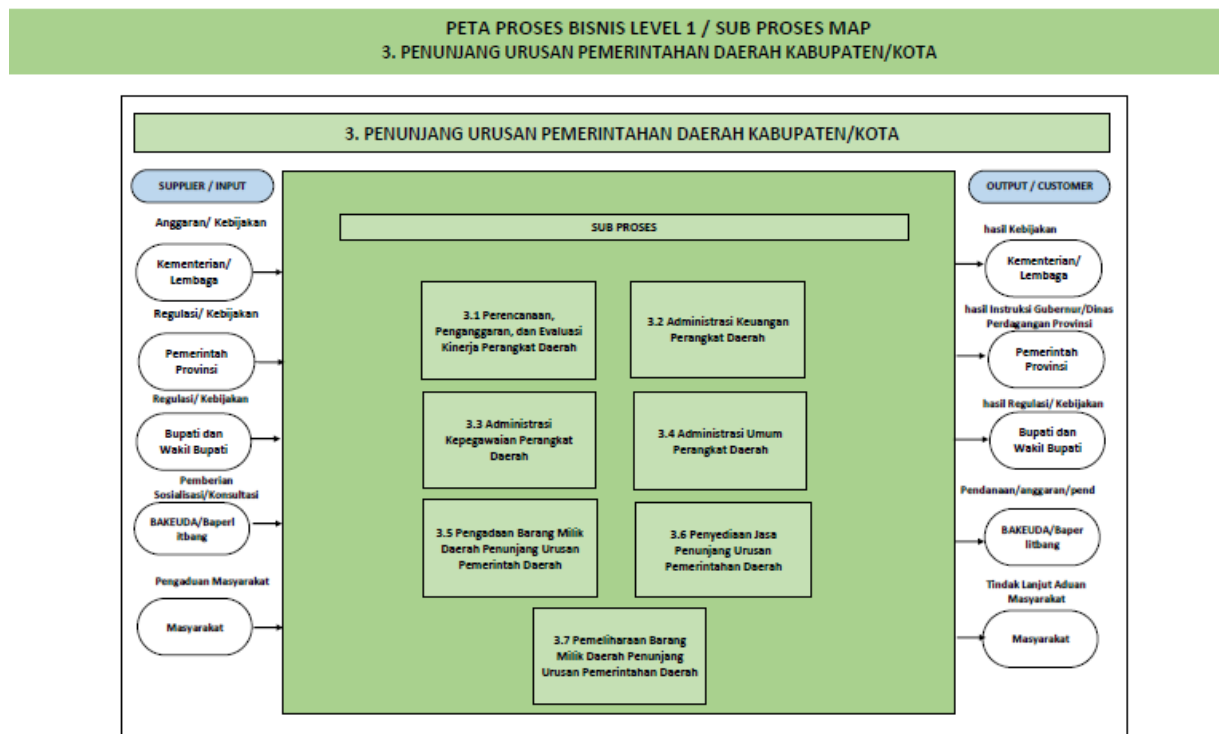
Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Level 1
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Level 1
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran



Gambar 1. 4
Peta Proses Bisnis Level 1
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Peta Proses Bisnis Level 1 (Peta Sub Proses) ini merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

3. Struktur Organisasi

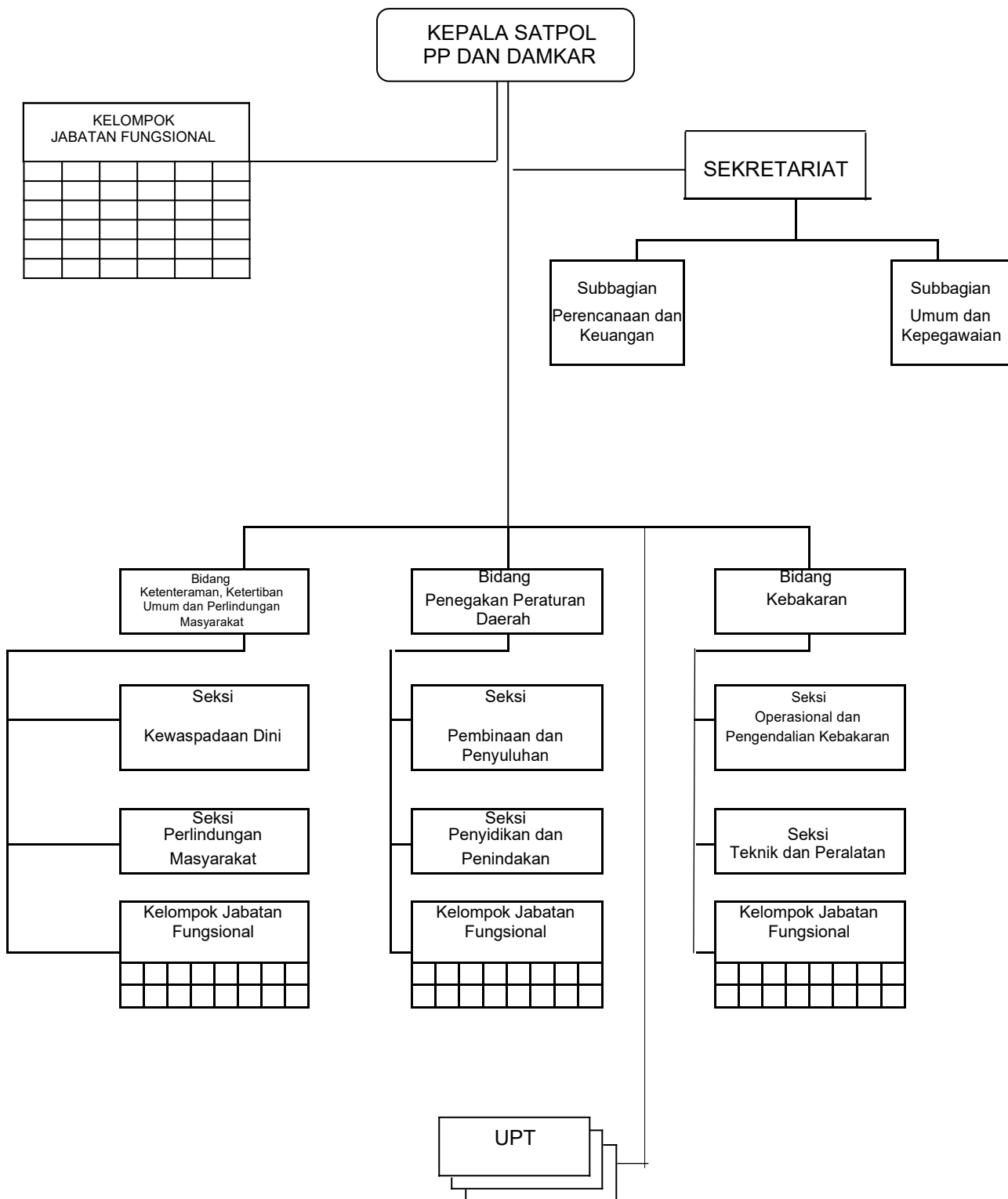
Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal disusun untuk mendukung pelaksanaan mandat kinerja dan peta proses bisnis secara optimal, serta menjamin kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan dalam organisasi. Pengaturan struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

Struktur organisasi tersebut terdiri atas pimpinan perangkat daerah yang didukung oleh unsur sekretariat, bidang-bidang teknis sesuai sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran, serta unit pelaksana

teknis yang melaksanakan fungsi operasional di lapangan. Susunan organisasi ini dirancang selaras dengan peta proses bisnis guna menjamin efektivitas koordinasi, komando, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta pencapaian kinerja organisasi.

Gambar 1.5

Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Satpol PP dan Damkar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Satpol PP dan Damkar mencapai target yang telah ditetapkan;
- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan kebakaran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

- j. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati yang mempunyai sanksi hukum kepada aparat, badan hukum atau masyarakat agar tercipta kemanfaatan dan kepastian hukum di Daerah;
- k. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pengembangan kelembagaan Satpol PP dan Damkar, penyiapan anggota, pembinaan mental dan fisik serta diklat peningkatan kemampuan bagi anggota Satpol PP dan Damkar dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Mengarahkan dan mengendalikan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna terciptanya kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pencegahan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana prasarana bidang kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dan Damkar dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Dengan adanya mandat kinerja yang jelas, peta proses bisnis yang tersusun sesuai ketentuan, serta struktur organisasi yang terdefinisi secara tegas, Satpol PP dan Damkar Kendal memiliki landasan kelembagaan yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kendal.

C. Isu-isu Strategis

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilandasi prinsip keselarasan merupakan salah satu ciri dari system demokrasi yang hidup dan berkembang dengan baik. Pengambilan keputusan yang demokratis mengisyaratkan bahwa suatu kebijakan harus melibatkan masyarakat dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Perkembangan teknologi dan iklim keterbukaan informasi publik yang semakin cepat, menjadikan setiap perangkat daerah harus dapat bersikap transparan dan professional selaras dengan perubahan yang terjadi.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara tujuan pembangunan yang akan dicapai dengan kondisi riil pada saat perencanaan pembangunan dibuat. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi obyektif daerah dan kesepakatan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, maka akan diketahui permasalahan utama Kabupaten Kendal. Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kendal tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik,
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah,

3. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Ada 4 (empat) permasalahan dan isu-isu Strategis Daerah. Dalam Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%,
2. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,
3. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020, Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan
4. tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

Urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan Stuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Rumusan Permasalahan : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya sistem manajemen SDM aparatur
		Belum optimalnya kinerja dan ketatalaksanaan OPD
		Belum optimalnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya system integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan asset daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan
3.	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat

NO	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran
		Belum optimalnya ketersediaan Sarana prasarana penunjang kinerja baik secara kualitas dan kuantitas
		Belum optimalnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan Tupoksi
		Belum optimalnya upaya pencegahan pelanggaran Perda baik yang non yustisi dan Pro yustisi
		Masih terbatasnya tingkat pembinaan linmas
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi lain

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa salah satu permasalahan adalah masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan salah satu akar masalah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Melihat dari akar masalah, maka peran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci keberhasilan untuk menurunkan angka gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan untuk permasalahan mengerucut pada Penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih tingginya pelanggaran Perda/Perkada;
2. Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban dalam masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain disebabkan masih rendahnya kepedulian masyarakat akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut :
 - a. Banyaknya pelanggaran Perda/Perkada dan timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan oleh warga menjadi permasalahan tersendiri dimana sanksi yang diberlakukan tidak menimbulkan efek jera;
 - b. Belum adanya regenerasi linmas sehingga linmas banyak yang sudah berusia lanjut.

- c. Belum terjangkaunya penanganan gangguan tibum tranmas dan penegakan Perda di wilayah pedesaan secara keseluruhan;
- d. Masih kurangnya jumlah PPNS sehingga mempengaruhi penyelidikan
- e. Potensi kekerasan di masyarakat dengan mengatasnamakan agama/aliran tertentu;
- f. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Satpol PP;
- g. Belum optimalnya penanganan kebakaran dan kualitas relawan penanganan kebakaran
- h. Masih kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran
- i. Masih kurangnya jumlah dan kualitas SDM Kesekretariatan

D. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah, perlu memiliki sumber daya manusia yang andal. Potensi SDM ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal di dukung oleh beberapa sumber daya yang ada, di antaranya Sumber Daya Manusia. Dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebanyak 252 ASN dan 40 Non ASN dengan Total Pegawai 292 pegawai per Oktober 2025.

Tabel 1.2
Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Non ASN		Jumlah
		PNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P	
1	S2/ Magister	1	2	-	-	-	-	3
2	S1/ Sarjana	26	6	-	4	4	-	40
3	Diploma3	4	-	-	-	-	-	4
4	Diploma 2	-	-	-	-	-	-	-
5	Diploma 1	-	-	-	-	-	-	-
6	SMA/ Sederajat	42	15	136	16	35	-	244
7	SMP/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Non ASN		Jumlah
		PNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P	
8	SD	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		73	23	136	20	40	-	292
		96		156		40		

Sumber : Satpolkar Kendal Oktober 2025

Berdasarkan golongan pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal diisi oleh PNS Golongan II dan PPPK setara Golongan II sebanyak 210 Orang, PNS Golongan III dan PPPK setara Golongan III sebanyak 37 Orang dan PNS Golongan IV sebanyak 5 Orang serta Non Golongan (Non ASN) sebanyak 40 Orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan

No	Golongan	ASN				NON ASN		Jumlah
		PNS		PPPK				
		L	P	L	P	L	P	
1	Golongan IV	3	2	-	-	-	-	5
2	Golongan III	27	6	-	4	-	-	37
3	Golongan II	43	15	136	16	-	-	210
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
6	Non Golongan (Non ASN)	-	-	-	-	40	-	40
Jumlah		73	23	136	16	40	-	292
		96		156		40		

Sumber : Satpolkar Kendal Oktober 2025

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan dan program perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai, demikian pula pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam mengoptimalkan kinerja maka di butuhkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja petugas di lapangan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Data Aset Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2025

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6
1	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN.ALAT LABORATORIUM PERTANIAN.ALAT PEMADAM KEBAKARAN	120	23	143	
2	ALAT UKUR UNIVERSAL.GLOBAL POSITIONING SYSTEM	7	2	9	
3	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT.ALAT KESEHATAN MATRA LAUT.TREAD MILL	6	1	7	
4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN.LEMARI PENYIMPAN	4	1	5	
5	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.FILING CABINET BESI	11	4	15	
6	MEUBELAIR.KURSI TAMU	5		5	
7	ALAT DAPUR.TABUNG GAS	9		9	
8	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	4	1	5	
9	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).MEGAPHONE	5	2	7	
10	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT.	4	2	6	
11	MEUBELAIR.KURSI	4	1	5	
12	ALAT DAPUR.TABUNG GAS	9		9	
13	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).TELEVISI	4	1	5	
14	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA SENER	6	2	8	
15	PERALATAN MINI KOMPUTER.PRINTER (PERLATAN MINI KOMPUTER)	2		2	
16	MEUBELAIR. MEUBLIAIR .KURSI KOMPUTER	2		2	
17	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN.PERSONAL COMPUTER		2	2	
18	RECORDER DISPLAY.PRINTER (RECORDED DISPLAY)	4	2	6	
19	PERSONAL KOMPUTER.LAP TOP	18		18	
20	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA.ALAT SAMAPTA	3	3	6	
21	TOPI KERJA.HELMET	34		34	
22	ALAT KANTOR LAINNYA.PAPAN PENGUMUMAN	80	10	90	
23	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM.BLENDER LAS POTONG	4	1	5	
24	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).GORDYIN/KRAY	90	20	110	
25	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.ALAT PEMBANTU KEBAKARAN	110	25	135	
26	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	5		5	

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6
27	KURSI KERJA PEJABAT.KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	4		4	
28	MEJA KERJA PEJABAT.MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	6		6	
29	KURSI KERJA PEJABAT.KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	5	2	7	
30	MEUBELAIR.MEJA 1/2 BIRO	30	10	40	
31	MEUBELAIR.KURSI RAPAT	122	18	140	
32	KURSI KERJA PEJABAT.KURSI KERJA PEJABAT .KURSI KERJA	32	8	40	
33	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.HIDRAN KEBAKARAN	10		10	
34	BAJU PENGAMAN.BAJU ANTI PANAS	40		40	
35	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).CAMERA VIDEO	3	3	6	
36	PERALATAN STUDIO AUDIO.LIGHT SIGNAL	15	3	18	
37	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH).MESIN GERINDA TANGAN	6		6	
38	POMPA.POMPA AIR	5		5	
39	SEPATU LAPANGAN.SEPATU BOOT	9	1	10	
40	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PLOTTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2		2	
41	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.SCANNER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	2		2	
42	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.VIEWER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	1		1	
43	PERSONAL KOMPUTER.NOTE BOOK	6		6	
44	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI KAYU		2	2	
45	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.LEMARI BESI/METAL	2		2	
46	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).DISPENSER	1	4	5	
47	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM.MESIN POTONG PLAT BENTUK / HAND NIMBLER	1	1	2	
48	ALAT PENDINGIN.ALAT PENDINGIN .AC UNIT	11	4	15	
49	ALAT PENDINGIN.A.C. SPLIT	3		3	
50	ALAT PEMADAM KEBAKARAN.PAKAIAN PANAS/LENGKAP	6		6	
51	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.MEGAPHONE	3	2	5	

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6
52	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.MONITOR	2		2	
53	ALAT PENOLONG.TRIPOD VERTICAL RESCUE	3		3	
54	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG.SEPEDA	3	1	4	
55	MEUBELAIR.MEUBLIAIR .TENDA	9		9	
56	PERSONAL KOMPUTER.P.C UNIT	6	4	10	
57	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA MEGAPHONE	4	3	7	
58	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).UNIT POWER SUPPLY (UPS)	2		2	
59	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS.KENDARAAN/MOBIL PENGAWALAN	2		2	
60	PERALATAN JARINGAN.NETWARE INTERFACE EXTERNAL	3	2	5	
61	MEUBELAIR.MEUBLIAIR .LEMARI LOCKER	5	1	6	
62	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT.LEMARI DAN ARSIP PEJABAT .LEMARI ARSIP UNTUK ARSIP DINAMIS	4	2	6	
63	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI.MESIN PEMOTONG PLAT		3	3	
64	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR.FILLING CABINET	4	1	5	
65	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.PRINTER (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER)	1		1	
66	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.STATION WAGON	4	1	5	
67	ALAT DAPUR.KOMPOR GAS (ALAT DAPUR)	8		8	
68	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.PICK UP	3		3	
69	PERALATAN STUDIO AUDIO.PERALATAN STUDIO VISUAL .PROYEKTOR + ATTACHMENT	1	2	3	
70	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.HANDY TALKY (HT)	85	21	106	
71	MEUBELAIR.MEJA RAPAT	3		3	
72	MEUBELAIR.TEMPAT TIDUR BESI	45	15	60	
73	MEUBELAIR.KASUR/SPRING BED		30	30	
74	ALAT PENDINGIN.LEMARI ES	4	2	6	
75	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS.MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	10	1	11	
76	ELECTRIC GENERATING SET.PORTABLE GENERATING SET	4		4	

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6
77	ALAT KANTOR LAINNYA.MESIN ABSENSI	6		6	
78	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN.ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN .CHAIN SAW	6		6	
79	PERKAKAS BENGKEL KAYU.GERGAJI CHAIN SAW	8		8	
80	ALAT DAPUR.KOMPOR GAS (ALAT DAPUR)	8		8	
81	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG.TRUCK + ATTACHMENT	3		3	
82	MEUBELAIR.MEJA KOMPUTER	1		1	
83	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN.SEDAN	1		1	
84	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR.KARDEX BESI	1		1	
85	SWITCHER/MENARA ANTENA.SELF SUPPORTING TOWER		1	1	
86	PERALATAN MAINFRAME.CPU (PERALATAN MAINFRAME)		1	1	
87	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA.AUTOMATIC GRINDING		1	1	
88	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG.GAS REGULATOR		1	1	
89	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE).LOUDSPEAKER		1	1	
90	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG.TANDU DORONG		1	1	
91	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG.TANDU DORONG		1	1	
92	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.CAMERA FILM	1		1	
93	ALAT KANTOR LAINNYA.CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	2	1	3	
94	MEUBELAIR.SICE		1	1	
95	PERSONAL KOMPUTER.CODE BREAKER SUPER KOMPUTER	1		1	
96	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.EXTERNAL		1	1	
97	POMPA.TRANSPORTABLE WATER PUMP	1		1	
98	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN.SELANG AIR	1		1	
99	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN.BREATHING APARATUS (TABUNG 10 KG)	1		1	
100	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN.BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN.TALI/BENANG	1		1	
101	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.LENSA KAMERA	1		1	

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Kondisi		Jumlah	Keterangan (Lengkap/Kurang/ Mencukupi)
		Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6
102	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.FACSIMILE	1	1	2	
103	PERSONAL KOMPUTER.CODE BREAKER SUPER KOMPUTER	1		1	
104	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER.EXTERNAL	1		1	
105	POMPA.TRANSPORTABLE WATER PUMP	1		1	
106	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN.SELANG AIR	1		1	
107	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN.BREATHING APARATUS (TABUNG 10 KG)	1		1	
108	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN.BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN.TALI/BENANG	1		1	
109	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM.LENSA KAMERA	1		1	
110	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE.FACSIMILE	2		2	
	Jumlah	1143	261	1404	

Sumber: Satpolkar Kendal Juli 2025

3. Anggaran

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Ringkasan Perubahan DPPA dan Belanja Daerah SKPD TA. 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 19.690.479.231	Rp. 19.190.612.700	(Rp. 499.866.513)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 13.099.161.243	Rp. 14.621.254.826	Rp. 1.522.093.583
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 6.591.317.970	Rp. 4.569.357.874	(Rp. 2.021.960.096)
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 405.627.470	Rp. 319.922.470	(Rp. 85.705.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 345.627.470	Rp. 319.922.470	(Rp. 25.705.000)
5	2	06	Belanja Modal Aset lainnya	Rp. 60.000.000	Rp. 0,00	(Rp. 60.000.000)
			Jumlah Belanja	Rp. 20.096.106.683	Rp. 19.510.535.170	(Rp. 585.571.513)

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, Dukungan SDM Sarana Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi tentang Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran, Inovasi serta Penghargaan.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan serta Rekomendasi.

F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Surat Bupati Kendal Nomor: 000.8.6.3/435/Insp tanggal 6 November 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satpolkar Kendal Tahun 2024, serta sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi, melalui surat Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Nomor : 300.1/1931/SATPOLKAR Tanggal : 19 Desember 2025 Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi AKIP Satpolkar Kendal Tahun 2024, dimana telah memuat Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan rincian rekomendasi, progres tindak lanjut, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Satpol PP dan Damkar

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1.	Dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian anggaran, agar memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya, diantaranya melalui penyesuaian anggaran pada kegiatan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional.	Melakukan penyesuaian anggaran secara terarah guna memprioritaskan pencapaian kinerja pada program/kegiatan yang belum mencapai target. Peningkatan kompetensi SDM tetap diupayakan melalui pengiriman personel pada pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional secara selektif serta berbasis kebutuhan jabatan. Pelaksanaan diklat dilakukan melalui kolaborasi dengan BKPP Kabupaten Kendal sebagai instansi teknis pengampu, guna mengoptimalkan fasilitas pelatihan mengingat keterbatasan anggaran Satpolkar yang terfokus pada prioritas pelayanan masyarakat, selain itu juga dilaksanakan pelatihan teknis secara mandiri.
2.	Mekanisme pengumpulan data kinerja agar dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan SOP pengumpulan data kinerja.	Menyusun dan menetapkan SOP pengukuran kinerja serta SOP pengumpulan data kinerja sebagai pedoman baku dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. SOP akan mengatur alur, metode, frekuensi, penanggung jawab, serta mekanisme verifikasi data untuk memastikan kualitas data kinerja yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dilakukan sosialisasi internal guna memastikan seluruh unit memahami dan menerapkan standar tersebut dalam penyediaan data kinerja perangkat daerah. https://bit.ly/PengukuranDanPengumpulanKinerja
3.	Penyusunan dokumen laporan kinerja agar menyajikan informasi pencapaian kinerja program beserta analisis capaian, serta hambatan/kendala yang dihadapi secara spesifik, terutama terhadap indikator kinerja yang belum tercapai.	Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan dokumen laporan kinerja, Satpolkar akan menyajikan informasi pencapaian kinerja program secara lebih lengkap, disertai analisis capaian serta uraian hambatan/kendala secara spesifik, terutama pada indikator yang belum mencapai target. Untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi data, proses penyusunan laporan kinerja didukung oleh aplikasi SieCantikPol sebagai sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi sehingga penyediaan data, verifikasi, dan analisis capaian dapat dilakukan secara lebih akurat dan terukur. https://satpolkar.kendalkab.go.id/siecantikpol https://satpolkar.kendalkab.go.id/statistik_kinerja
4.	Keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait pengukuran capaian kinerja agar didukung dengan dokumentasi yang memadai berupa undangan rapat, foto kegiatan, daftar hadir, dan berita acara rapat internal, serta secara rutin menyusun laporan hasil evaluasi	Untuk memperkuat keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran capaian kinerja, Satpolkar telah melengkapi seluruh kegiatan pengambilan keputusan dengan dokumentasi yang memadai, berupa undangan rapat, daftar hadir, foto kegiatan, dan berita acara rapat internal. Selain itu, Satpolkar akan menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja internal/monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin kepada Bupati Kendal sebagai bentuk

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
	kinerja internal/monitoring dan evaluasi (monev) kepada Bupati Kendal.	pertanggungjawaban dan penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. https://bit.ly/DataDukungKeterlibatanPimpinan
5.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya sesuai Rencana Aksi, serta menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.	Seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti sesuai Rencana Aksi yang telah ditetapkan. Satpolkar juga telah menyampaikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pemenuhan komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. https://bit.ly/MatriksTLRekomSAKIP2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangda

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih periode tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan"

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) Handal, (2) Unggul, (3) Makmur, (4) Berkeadilan. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2021-2026. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pedoman stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **KENDAL HANDAL** : adalah suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai Pusat Industri dan Pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdayasaing serta berwawasan lingkungan;
2. **UNGGUL** : adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0;
3. **MAKMUR** : adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal;
4. **BERKEADIIAN** : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Dalam rangka pencapaian visi di atas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil

- dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan;
 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung Misi 3, yaitu: **Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan.**

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2021	2022	2023	2024	2025
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	97%	97%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Tujuan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan rasa aman dari bahaya kebakaran			Indeks Penyelenggaraaan Trantibumlinmas	72 Skor	82,32 Skor	82,57 Skor	82,82 Skor	83,07 Skor
				Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,05 Nilai	74,15 Nilai	75,05 Nilai	75,45 Nilai	76,05 Nilai
		1.2	Meningkatnya ketertiban, keamanan wilayah	Persentase penurunan gangguan Trantibum	14 persen	15 persen	18 persen	20 persen	22 persen
		1.3	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap kebakaran (<i>respond time rate</i>)	97,50 persen	98,00 persen	98,45 persen	99,15 persen	99,45 persen

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

1. Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif,

2. Meningkatkan kentrampilan dan ketertiban umum melalui peneggakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM,
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui penataan desa, peningkatan administrasi desa, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan tahun 2025 **“Kendal Inclusive”**.

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 di prioritaskan pada **“Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”**. Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	1.1	Meningkatnya kualitas peneggakan peraturan daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
		1.2	Meningkatnya penanganan kebakaran	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (<i>respon time</i>)	%	100

Tabel 2.4
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah	1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, 2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui pendekatan non justisi dan pro justisi, 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas linmas di kabupaten Kendal, 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM melalui Diklat, Bintek dan Uji Kompetensi.	1. Pelaksanaan patroli wilayah dan pembentukan kelompok patroli yang menyasar di wilayah kecamatan, 2. Meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui operasi penegakan Perda dan pemberdayaan PPNS, 3. meningkatnya kualitas dan kuantitas linmas dengan pemberdayaan Satlinmas, 4. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dengan fokus pada sertifikasi kompetensi Satpol dan Penyidik PNS.
2.	Meningkatnya penanganan kebakaran	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada dalam penanggulangan kebakaran, 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.	1. Meningkatkan pelayanan Pencegahan kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil serta pencapaian target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka dari itu ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time</i>)	%	100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	74,55

Tabel 2.6
Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TATGET
1.	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100 %
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	%	100 %
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	74,55

Keterangan: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna pencapaian indikator sasaran dan untuk mendukung pelaksanaan implementasi sistem akuntabilitas kinerja dari proses perencanaan, pengendalian kegiatan sampai ke tahapan pelaporan maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal menggunakan instrumen-instrumen pendukung yaitu :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kendal menggunakan SIPD dalam proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan keuangan. Aplikasi SIPD dapat diakses oleh pegawai dengan akses pengguna anggaran / kepala

satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari PPTK dan Bendahara Pengeluaran.

2. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK)

SIMPOK adalah sebuah sistem informasi berbasis website, yang memudahkan untuk manajemen pengendalian operasional kegiatan pembangunan daerah, dengan tujuan ialah tersedianya informasi pengendalian operasi kegiatan yang cepat, mudah, akurat serta up-to-date. Serta sistem informasi ini sudah terintegrasi dengan SIRUP-LKPP, SIMDA Keuangan atau dengan MONEV. Sistem ini memberikan fitur pemasukan data realisasi keuangan, Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dilengkapi dengan Peta Spasial (GIS), Laporan POK, dan memberikan fitur eksekutif summary (EIS) dan grafik, serta memberikan fitur pencetakan laporan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Pengendalian yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di SETDA dan SKPD lain, terkait dengan proses pengendalian pembangunan.

3. Si – EVA

Aplikasi ini adalah suatu sistem pelaporan periodik/berkala per triwulan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sasaran eselon 2, kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan RKPD secara umum dan Rencana Kerja /Renja Perangkatda secara khusus. Seluruh perangkat menginput capaian kinerja sasaran, program kegiatan dalam aplikasi untuk dipantau dan dilaporkan kepada bupati sebagai wujud pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan.

4. E - SAKIP Kabupaten Kendal

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (eSAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya.

Informasi yang dihasilkan dari aplikasi eSAKIP ini menampilkan informasi meliputi beberapa evidence / data dukung terhadap pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

E SAKIP dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangka / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

5. E - SAKIP REVIU (ESR)

E-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online. ESR ini secara umum memiliki tujuan seperti E SAKIP Kendal dimana aplikasi ini dapat diakses oleh semua perangkat daerah melalui admin perangka / pejabat/ petugas yang mengelola SAKIP dan juga para Evaluator SAKIP untuk melaksanakan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kendal.

6. SieCantikPol

SieCantikPol (Sistem Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Satpolkar) adalah sebuah aplikasi berbasis digital yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemantauan serta evaluasi capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal. Aplikasi ini dikembangkan sebagai respons terhadap tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja yang sebelumnya masih bersifat manual, yang sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam pencatatan, analisis, serta pengambilan keputusan strategis berbasis data. Dengan adanya SieCantikPol, proses pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis, cepat, dan akurat, sehingga memudahkan pimpinan dalam menilai pencapaian target serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk peningkatan layanan publik, khususnya dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang akan dicapai. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2025 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS),
2. Akuntabilitas Keuangan,
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

1. Sangat Baik : > 100%
2. Baik : 85 - 100%
3. Cukup : 65 - 84,99%
4. Kurang : 50 - 64,99%
5. Sangat Kurang : < 50%

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2021-2026)

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100%
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time</i>)	%	100	98,38	98,38	100%
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai	74,55	74,25	99,59	76,55

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2025-2029)

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD
				TARGET	REALISASI	%	
1.	T: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan rasa aman dari bahaya kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	72,00	65,14 (Baik)	90,47	83,32
		Persentase Kesiapsiagaan Damkar	Persen	100	100	100	100
2.	S: Meningkatnya ketertiban, keamanan wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	Persen	14	(9,09)	(64,92)	25
3.	S: Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap kebakaran (<i>respond time rate</i>)	Persen	97,50	98,38	100	100
4.	S: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,05	74,25	100	76,55

Tabel kinerja yang disajikan terdiri dari dua tabel capaian kinerja Tahun 2025, yaitu Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2021–2026 serta Tabel Capaian Kinerja berdasarkan Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2025–2029. Penyajian dua tabel tersebut dilakukan karena Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, dimana pada tahun berjalan masih terdapat target dan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra periode sebelumnya (2021–2026), sekaligus mulai diberlakukannya Renstra baru periode 2025–2029 yang selaras dengan RPJMD terbaru.

Penyusunan dua tabel capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah, baik yang bersumber dari dokumen perencanaan lama maupun dokumen perencanaan baru. Dengan demikian, seluruh indikator kinerja yang relevan pada Tahun 2025 tetap dapat terukur dan dilaporkan secara akuntabel tanpa mengabaikan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, meskipun capaian kinerja disajikan dalam dua tabel yang berbeda sesuai dengan periode Renstra masing-masing, pembahasan kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan secara komprehensif melalui analisis capaian kinerja. Analisis tersebut mencakup perbandingan antara target dan realisasi, tingkat capaian kinerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pencapaiannya. Hasil analisis capaian kinerja tersebut akan disajikan secara lebih rinci dalam tabel analisis kinerja pada bagian berikutnya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja perangkat daerah ke depan.

Tabel 3.3

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (Renstra 2021-2026)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	Baik	Data Realisasi Kinerja Satpolkar Tahun 2025 melalui SieCantikPol

2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (respon time)	100	98,38	98,38	Baik	Data Realisasi Kinerja Satpolkar Tahun 2025 melalui SieCantikPol
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	74,55	74,25	99,59	Baik	LHE Inspektorat Daerah Kab. Kendal atas AKIP Satpolkar Kendal Nomor : 000.8.6.3/419/Insp Tanggal 30 Oktober 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Tujuan/Sasaran Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegaskan menunjukkan hasil yang optimal. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi objek penegakan pada Tahun berjalan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian antara target dan realisasi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan tercapainya target secara penuh, capaian kinerja indikator ini berada pada kategori **Baik**, yang menunjukkan bahwa upaya penegakan Perda dan Perkada telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Tujuan/Sasaran Meningkatnya Penanganan Kebakaran dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (response time) menunjukkan hasil yang baik. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 98,38 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,38 persen dan termasuk dalam kategori **Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penanganan

kejadian kebakaran telah dilaksanakan sesuai dengan standar waktu tanggap yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kejadian yang belum sepenuhnya memenuhi standar akibat faktor tertentu seperti jarak lokasi kejadian, kondisi aksesibilitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Secara keseluruhan, kinerja penanganan kebakaran tetap berjalan efektif dan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Tujuan/Sasaran Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP menunjukkan kinerja yang baik. Target yang ditetapkan sebesar 74,55, sementara realisasi yang dicapai sebesar 74,25, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 99,59 persen dan termasuk dalam kategori **Baik**. Selisih yang relatif kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, serta pelaporan kinerja agar capaian SAKIP ke depan dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
(Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	T: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan rasa aman dari bahaya kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	72,00	65,14 (Baik)	90,47	Baik	Hasil Penilaian dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
		Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100	100	100	Baik	Data Realisasi Kinerja Satpolkar Tahun 2025 melalui SieCantikPol
2.	S: Meningkatnya ketertiban, keamanan wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	14	(9,09)	(64,92)	Sangat Kurang	Data Realisasi Kinerja Satpolkar Tahun 2025 melalui SieCantikPol

3.	S: Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Tingkat waktu tanggap kebakaran (<i>respond time rate</i>)	97,50	98,38	100	Baik	Data Realisasi Kinerja Satpolkar Tahun 2025 melalui SieCantikPol
4.	S: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,05	74,25	100	Baik	LHE Inspektorat Daerah Kab. Kendal atas AKIP Satpolkar Kendal Nomor : 000.8.6.3/419/Insp Tanggal 30 Oktober 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Tujuan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat serta rasa aman dari bahaya kebakaran yang diukur melalui dua indikator kinerja menunjukkan hasil yang baik. Pada Indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas, target yang ditetapkan sebesar 72,00 dengan realisasi sebesar 65,14, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 90,47 persen dan termasuk dalam kategori **Baik**, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan cukup efektif meskipun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek pendukung. Sementara itu, pada Indikator Persentase Kesiapsiagaan Damkar, target sebesar 100 persen dapat direalisasikan secara penuh dengan capaian 100 persen, yang mencerminkan kesiapan sumber daya dan sistem penanggulangan kebakaran dalam memberikan layanan perlindungan kepada masyarakat secara optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah yang diukur melalui Indikator Kinerja Persentase Penurunan Gangguan Trantibum menunjukkan hasil yang **Sangat Kurang**. Target yang ditetapkan sebesar 14 persen penurunan gangguan, namun realisasi yang dicapai justru sebesar -9,09 persen, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar -64,92 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada Tahun berjalan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika sosial masyarakat, meningkatnya aktivitas publik, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan dan penindakan. Hasil capaian ini menjadi bahan evaluasi penting bagi perangkat daerah untuk

memperkuat strategi pencegahan, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi upaya penegakan ketertiban dan keamanan wilayah pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran yang diukur melalui Indikator Kinerja Tingkat waktu tanggap kebakaran (*respond time rate*) menunjukkan hasil yang **Baik**. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 97,50 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 98,38 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penanganan kejadian kebakaran telah melampaui standar waktu tanggap yang ditetapkan, yang mencerminkan kesiapsiagaan personel, efektivitas sistem komando, serta dukungan sarana dan prasarana dalam memberikan respons cepat terhadap kejadian kebakaran, sehingga mampu meningkatkan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun berjalan, capaian kinerja pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan hasil yang **Baik**. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 74,05, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 74,25, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada perangkat daerah telah berjalan secara efektif dan konsisten, didukung oleh perencanaan kinerja yang selaras, pengukuran yang terstruktur, serta pelaporan kinerja yang akuntabel, sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan pada Tahun berjalan.

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai	100	98,83	98,83	100	99,21	99,21	100	98,38	98,38

		Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)									
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	70,55	73,00	103	72,55	73,75	101%	74,55	74,25	99,59

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan tahun sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada indikator Sasaran Strategis ke 1 Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi pada capaian kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023, masih di target predikat penilaian yang sama yaitu tingkat ketercapaian 100% artinya semua Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP seluruhnya telah tertangani atas pelanggarannya,
2. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 pada Indikator ke 2 Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) pada capaian kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 masih mengalami penurunan penanganan yaitu menurun sebesar 0,83% dari tahun 2023 realisasi 98,83% dan Tahun 2024 meningkat ketercapaiannya menjadi 99,21%, terdapat 3 (tiga) kasus kebakaran yang tidak tercapai waktu tanggapnya, namun secara keseluruhan laporan atas kejadian kebakaran setiap tahunnya seluruhnya tertangani.
3. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 pada Indikator ke 3 Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah pada capaian kinerja Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan karena target yang ditetapkan adalah Predikat Interpretasi Huruf BB capaian pada huruf BB. Begitu juga dengan target realisasi di tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan adanya peningkatan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di setiap tahunnya.

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	98,38 %	100 %	98,38 %
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	74,25 (BB)	76,55 (BB)	96,99 %

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan yang dievaluasi sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2025 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 100 %.
2. Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*respon time*) sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu capaian pada tahun pelaporan 2025 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 98,38 %.
3. Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada indikator Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yaitu

capaian pada tahun pelaporan 2025 dibandingkan dengan target akhir pada Rencana Strategis Tahun 2026 sudah tercapai di angka 96,99 %.

Tabel 3.7

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	Ketercapaian target dengan jumlah 18 perda/perkada telah tertangani dengan keberadaan 8 Orang PPNS disebabkan intensitas kegiatan selama tahun 2025 dengan penanganan 47 kasus pelanggaran perda/perkada serta 47 laporan yang telah ditindak secara yustisi maupun non yustisi	Konsistensi pengampu kebijakan secara intensif dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran perda/perkada
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100	98,38	98,38	Ketercapaian target penanganan kebakaran atas waktu tanggap dengan total 186 kasus kebakaran dan 3 kasus tidak tercapai <i>respon time</i> dimana wilayah kabupaten Kendal terdapat 20 kecamatan hanya ter backup 6 sektor pemadam kebakaran.	Penambahan sektor damkar berikut mobil pemadam kebakaran dan juga penyukupan sarpras yang sesuai standar serta SDM yg ada.
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	74,55	74,25	99,59	Terdokumentasinya kegiatan yang konsisten guna memudahkan dalam pengukuran serta Analisa kinerja yg didukung aplikasi SieCantikPol	Konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja.

Analisis keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal, ditandai dengan tercapainya indikator Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini terealisasi melalui penanganan secara menyeluruh terhadap 18 Perda/Perkada yang menjadi objek penegakan, dengan dukungan sumber daya sebanyak 8 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara konsisten dan intensif melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan, serta penyelesaian pelanggaran. Sepanjang tahun 2025, intensitas kegiatan penegakan Perda/Perkada tergolong tinggi, tercermin dari realisasi penanganan sebanyak 47 kasus pelanggaran dan 47 laporan masyarakat yang seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yustisi maupun non yustisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan realisasi kinerja ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum daerah yang didukung oleh konsistensi pengampu kebijakan dalam mengawal proses penegakan Perda/Perkada secara berkelanjutan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya deviasi atau penurunan capaian.
2. Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Kebakaran pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase penanganan kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (response time) sebesar 98,38% dari target 100%. Capaian tersebut terealisasi melalui penanganan sebanyak 186 kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal, dimana sebagian besar kejadian berhasil ditangani sesuai standar waktu tanggap yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 3 kasus kebakaran yang belum memenuhi standar response time, yang disebabkan oleh keterbatasan jangkauan layanan pemadam kebakaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah Kabupaten Kendal yang terdiri dari 20 kecamatan, sementara saat ini layanan pemadam kebakaran baru didukung oleh 6 sektor pemadam kebakaran, sehingga pada beberapa lokasi tertentu memerlukan waktu tempuh yang lebih lama untuk menjangkau titik kejadian.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kejadian kebakaran di sebagian besar wilayah. Sebagai tindak lanjut atas kendala yang masih dihadapi, telah dilakukan upaya perbaikan melalui perencanaan penambahan sektor pemadam kebakaran beserta pengadaan unit mobil pemadam kebakaran, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar operasional, serta penguatan dan penyesuaian sumber daya manusia yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan layanan, mempercepat waktu tanggap, serta meningkatkan realisasi kinerja penanganan kebakaran agar dapat mencapai target secara optimal pada periode berikutnya.

3. Realisasi kinerja sasaran strategis Mewujudkan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik pada periode pelaporan menunjukkan capaian yang sangat baik, ditandai dengan perolehan nilai SAKIP sebesar 74,25 dari target 74,55 atau mencapai 99,59%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pengelolaan kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, sehingga seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Pemanfaatan aplikasi SieCantikPol turut berperan signifikan dalam mendukung proses analisis dan pengukuran kinerja, karena mampu menyajikan data kinerja secara terintegrasi, akurat, dan mudah ditelusuri, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaporan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, selisih yang sangat kecil tersebut menunjukkan kinerja birokrasi yang relatif stabil tanpa penurunan signifikan, sekaligus mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam penyempurnaan kualitas dokumen dan implementasi manajemen kinerja. Sebagai tindak lanjut, upaya yang telah dilakukan adalah menjaga konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan, sehingga efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

Tabel 3.8

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	2.380.307.340	1.122.134.604	47,14	52,85
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	100	98,38	98,38	1.497.873.293	1.350.712.458	90,18	9,82
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	74,55	74,25	99,59	15.632.354.537	14.653.329.639	93,74	6,26

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penegakan Peraturan Daerah adalah sebesar Rp.1.122.134.604,- atau 47,14% dari total pagu sebesar Rp.2.380.307.340,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 52,85% dari Pagu yang ditentukan.
2. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Penanganan Kebakaran adalah sebesar Rp.1.350.712.458,- atau 90,18% dari total pagu sebesar Rp. 1.497.873.293,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 9,82% dari Pagu yang ditentukan.
3. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran Strategis Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp.14.653.329.639,- atau 93,74% dari total

pagu sebesar Rp.15.632.354.537,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya kurang lebih sebesar 6,26% dari Pagu yang ditentukan.

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda/perkada yang diterbitkan	100	Menunjang
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang dibina	100	Menunjang
2.	Meningkatnya Penanganan Kebakaran	Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time</i>)	98,38	Program Pencegaha, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Menunjang
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakara	100	Menunjang
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pesentase peralatan proteksi kebakaran yang terinspeksi	100	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang diberdayakan	100	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang diselenggarakan	100	Menunjang
3.	Mewujudkan tata kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	99,59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali seratus	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai dibagi jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai sesuai ketentuan dikali seratus	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai Ketentuan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	Menunjang

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian seluruh indikator tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mencapai **100%**, menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program telah dilakukan secara optimal dan terarah.

Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi antarunit kerja, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta komitmen kuat dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga berperan penting dalam memastikan setiap target kinerja dapat tercapai tepat waktu dan sesuai indikator yang ditentukan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum mencapai angka 100%, namun tetap menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan mendekati target maksimal. Indikator Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*response time*) tercapai sebesar **98,38%**. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penanganan kebakaran telah memenuhi standar waktu tanggap yang ditetapkan, serta mencerminkan kesiapsiagaan dan respons cepat petugas di lapangan. Selisih capaian yang masih ada menjadi bahan evaluasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas operasional melalui penguatan sarana prasarana, optimalisasi pola penugasan, dan peningkatan koordinasi.

Selain itu, indikator Nilai SAKIP mencapai **99,59%**, yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan dengan sangat baik dan konsisten. Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang hampir sempurna. Kekurangan yang sangat minimal tersebut menjadi peluang perbaikan untuk semakin menyempurnakan tata kelola kinerja dan memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja secara optimal. Adanya indikator yang belum mencapai 100% tidak mengurangi kinerja secara umum, melainkan menjadi dasar yang positif untuk peningkatan berkelanjutan guna mencapai kinerja yang semakin unggul di masa mendatang.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan sasaran, program, serta kegiatan yang telah direncanakan.

Penggunaan anggaran diarahkan secara langsung untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Setiap alokasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan serta mempertimbangkan prinsip *value for money*, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan kinerja yang maksimal.

Realisasi anggaran yang telah digunakan menunjukkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta mencerminkan tingkat disiplin anggaran yang baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan kinerja, sehingga capaian kinerja organisasi dapat diwujudkan secara efektif sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Dengan demikian, realisasi anggaran tidak hanya menggambarkan tingkat penyerapan anggaran semata, namun juga mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp835,060,000	Rp783,673,549	93.85
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Rp450,000	Rp400,000	88.89

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp2,000,000	Rp2,000,000	100.00
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp1,680,000	Rp400,000	23.81
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp59,000,000	Rp58,950,000	99.92
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp43,950,000	Rp13,250,000	30.15
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp5,016,900	Rp0	0.00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp1,429,050,440	Rp259,461,055	18.16
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp4,100,000	Rp4,000,000	97.56
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp762,000,000	Rp702,513,000	92.19
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp111,572,000	Rp105,650,000	94.69
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Rp6,070,000	Rp1,600,000	26.36
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp113,237,750	Rp107,160,455	94.63
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1,500,000	Rp1,250,000	83.33
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp5,000,000	Rp4,200,000	84.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp426,053,543	Rp383,213,288	89.94
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Rp14,078,000	Rp13,466,720	95.66
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp50,558,000	Rp24,604,995	48.67
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Rp7,804,000	Rp7,054,000	90.39
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp62,089,000	Rp58,078,000	93.54
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp800,000	Rp0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp2,305,000	Rp1,022,000	44.34
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp1,857,000	Rp0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp1,500,000	Rp1,447,600	96.51
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp14,621,254,826	Rp13,759,484,599	94.11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp2,000,000	Rp1,446,400	72.32
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp30,600,000	Rp22,936,800	74.96
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp22,709,000	Rp20,875,000	91.92
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp15,000,000	Rp12,422,930	82.82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp54,063,000	Rp53,425,000	98.82
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp45,998,600	Rp45,646,800	99.24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp100,512,866	Rp81,953,466	81.54
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp28,500,000	Rp25,936,650	91.01
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5,000,000	Rp4,450,000	89.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp276,985,600	Rp250,563,214	90.46
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45,260,000	Rp42,219,915	93.28

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp174,300,000	Rp139,163,165	79.84
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp92,034,645	Rp91,641,600	99.57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp49,585,000	Rp40,616,500	81.91
TOTAL :		Rp19,510,535,170	Rp17,126,176,701	87.78

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Satpolkar Kendal memiliki plafon anggaran sebesar Rp19.510.535.170, dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.126.176.701, atau mencapai 87,78%, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2.384.358.469. yang merupakan hasil proses pelaksanaan efisiensi anggaran 2025. Selain bagian dari proses efisiensi anggaran 2025, secara umum juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, khususnya pada komponen tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), terdapat sisa anggaran yang disebabkan adanya jabatan yang masih kosong, meskipun anggarannya telah disiapkan dalam APBD sebagai bentuk antisipasi kebutuhan organisasi dan kepatuhan terhadap perencanaan kepegawaian;
2. Penggunaan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang belum dapat direalisasikan secara maksimal, seiring dengan penyesuaian kebijakan teknis dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun terdapat SiLPA sebagaimana tersebut di atas, namun pencapaian realisasi keuangan Satpolkar Kendal melebihi 80%, serta dikelola dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Lebih lanjut, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan kinerja Satpolkar Kendal, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian indikator kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Seluruh aduan masyarakat dapat tertangani dengan baik;

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanggulangan kebakaran tercapai secara optimal.

C. Inovasi

Pada Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal mengembangkan dua inovasi strategis sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Inovasi pertama adalah **Pengawasan Disiplin Bersama Petugas Tindak Internal melalui Konten “WASDIKAR”**, yang bertujuan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan disiplin aparatur, serta membangun budaya kerja profesional dan akuntabel melalui media komunikasi yang edukatif dan informatif. Inovasi kedua yaitu **“SI-PADAM” (Sistem Informasi Peralatan Pemadam Kebakaran)** yang dikembangkan untuk mendukung kesiapsiagaan operasional pemadam kebakaran melalui pengelolaan data peralatan secara terintegrasi, akurat, dan mudah diakses. Kedua inovasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, serta pelayanan pemadam kebakaran yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

1. Pengawasan Disiplin Bersama Petugas Tindak Internal melalui Konten “WASDIKAR” pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tujuan yang dicapai dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal, dengan target capaian sebagai berikut :

- a. Tujuan Jangka Pendek

Membentuk Petugas Tindak Internal Melalui Konten "WASDIKAR" (Pengawasan Disiplin Pegawai Satpolkar) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

- b. Tujuan Jangka Menengah

Terwujudnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkala sebagai langkah peningkatan kualitas kinerja organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

c. Tujuan Jangka Panjang

Kolaborasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam pengawasan disiplin pegawai pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

2. SI-PADAM (Sistem Informasi Peralatan Pemadam Kebakaran) Untuk Mendukung Kesiapsiagaan Operasional Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

Tujuan yang dicapai dari aksi perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pengelolaan peralatan pemadam kebakaran yang berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal. Melalui tujuan tersebut telah memberikan dampak pengelolaan peralatan pemadam kebakaran yang akan meningkatkan kualitas kinerja dari Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Capaian Jangka Pendek

Terwujudnya efektivitas dan efisien pengelolaan peralatan pemadam kebakaran melalui “SI-PADAM” (Sistem Informasi Peralatan Pemadam Kebakaran) untuk mendukung kesiapsiagaan operasional pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.

b. Capaian Jangka Menengah

Terwujudnya pendataan sarana prasarana dan fasilitas penunjang dalam sektor pemadam kebakaran .

c. Capaian Jangka Panjang

Terwujudnya pengembangan Aplikasi SIPADAM

D. Penghargaan

Pada Tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal belum memperoleh penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen dan semangat kerja seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelayanan pemadam kebakaran tetap dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Fokus organisasi tetap diarahkan pada peningkatan kinerja, profesionalisme aparatur, serta kualitas

pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab dan amanat kepada masyarakat, dengan harapan capaian kinerja yang berkelanjutan dapat menjadi dasar untuk meraih pengakuan dan prestasi pada periode selanjutnya.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelayanan pemadam kebakaran. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta mengacu pada target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari komitmen organisasi dalam meningkatkan profesionalisme aparatur, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Meskipun masih terdapat tantangan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja sasaran strategis Mewujudkan Tata Kelola serta Meningkatkan Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik pada periode pelaporan menunjukkan capaian yang sangat baik, ditandai dengan perolehan nilai SAKIP sebesar 74,25 dari target 74,55 atau mencapai 99,59%. Capaian tersebut didukung oleh terlaksananya pengelolaan kinerja secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik, sehingga seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Pemanfaatan aplikasi SieCantikPol turut berperan signifikan dalam mendukung proses analisis dan pengukuran kinerja, karena mampu menyajikan data kinerja secara terintegrasi, akurat, dan mudah ditelusuri, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaporan. Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, selisih yang sangat kecil tersebut menunjukkan kinerja birokrasi yang relatif stabil tanpa penurunan signifikan, sekaligus mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan dalam

penyempurnaan kualitas dokumen dan implementasi manajemen kinerja. Sebagai tindak lanjut, upaya yang telah dilakukan adalah menjaga konsistensi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan, sehingga efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

2. Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal, ditandai dengan tercapainya indikator Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini terealisasi melalui penanganan secara menyeluruh terhadap 18 Perda/Perkada yang menjadi objek penegakan, dengan dukungan sumber daya sebanyak 8 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara konsisten dan intensif melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan, serta penyelesaian pelanggaran. Sepanjang tahun 2025, intensitas kegiatan penegakan Perda/Perkada tergolong tinggi, tercermin dari realisasi penanganan sebanyak 47 kasus pelanggaran dan 47 laporan masyarakat yang seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui mekanisme yustisi maupun non yustisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan realisasi kinerja ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum daerah yang didukung oleh konsistensi pengampu kebijakan dalam mengawal proses penegakan Perda/Perkada secara berkelanjutan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya deviasi atau penurunan capaian.
3. Realisasi kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penanganan Kebakaran pada tahun berjalan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan persentase penanganan kebakaran sesuai Standar Tingkat Waktu Tanggap (*response time*) sebesar 98,38% dari target 100%. Capaian tersebut terealisasi melalui penanganan sebanyak 186 kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal, dimana sebagian besar kejadian berhasil ditangani sesuai standar waktu tanggap yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat 3 kasus kebakaran yang belum memenuhi standar response time, yang disebabkan oleh keterbatasan jangkauan layanan pemadam kebakaran. Kondisi ini dipengaruhi oleh luasnya wilayah Kabupaten Kendal yang terdiri dari 20 kecamatan, sementara saat ini layanan pemadam kebakaran baru didukung

oleh 6 sektor pemadam kebakaran, sehingga pada beberapa lokasi tertentu memerlukan waktu tempuh yang lebih lama untuk menjangkau titik kejadian.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam menangani kejadian kebakaran di sebagian besar wilayah. Sebagai tindak lanjut atas kendala yang masih dihadapi, telah dilakukan upaya perbaikan melalui perencanaan penambahan sektor pemadam kebakaran beserta pengadaan unit mobil pemadam kebakaran, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar operasional, serta penguatan dan penyesuaian sumber daya manusia yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan layanan, mempercepat waktu tanggap, serta meningkatkan realisasi kinerja penanganan kebakaran agar dapat mencapai target secara optimal pada periode berikutnya.

4. Realisasi efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran sebesar Rp.17.126.176.701,- atau 87,78% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp.19.510.535.170,- Sehingga Tahun 2025 terdapat efisiensi Rp.2.384.358.469,- atau 12,22%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025, kinerja organisasi secara umum telah menunjukkan hasil yang sangat baik pada seluruh sasaran strategis yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan pada periode berikutnya. Pada aspek tata kelola dan efektivitas birokrasi, langkah perbaikan diarahkan pada penyempurnaan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya melalui peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja agar capaian kinerja dapat lebih optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pendukung pengelolaan kinerja juga perlu terus dilanjutkan untuk memperkuat akurasi data, konsistensi pengukuran, serta kualitas pelaporan kinerja.

Pada sasaran peningkatan kualitas penegakan Peraturan Daerah, meskipun target kinerja telah tercapai secara optimal, diperlukan upaya

berkelanjutan dalam menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum daerah. Langkah ke depan difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peningkatan kualitas pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan aparat penegak hukum terkait guna memastikan keberlanjutan capaian kinerja.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan penanganan kebakaran, langkah perbaikan difokuskan pada upaya perluasan jangkauan layanan pemadam kebakaran untuk menjawab keterbatasan wilayah layanan yang masih dihadapi. Rekomendasi ke depan meliputi perencanaan penambahan sektor pemadam kebakaran, pengadaan dan pemenuhan sarana prasarana sesuai standar operasional, serta penguatan dan penyesuaian sumber daya manusia. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat waktu tanggap penanganan kebakaran, meningkatkan cakupan pelayanan, serta mendorong pencapaian target kinerja secara optimal pada periode selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pada periode berikutnya.

Kendal, 22 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008

LAMPIRAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KENDAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Presentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	25%	25%	25%	25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																			
						Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 43,700,000															
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Adanya biaya penyusunan dokumen perencanaan	Rp 24,300,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan														
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Adanya biaya penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 13,300,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan														
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Adanya biaya penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 6,100,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan															
	Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	25%	25%	25%	25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 17,525,912,718															
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/Bulan	Adanya Biaya Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 17,447,756,718	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan														
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Adanya biaya penyusunan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp 75,125,000															
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Adanya biaya penyusunan laporan keuangan	Rp 3,031,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan														

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 42,295,000															
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 42,295,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan															
	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp 300,810,000															
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Gaji PPPK Paruh Waktu, Tenaga Outsorching Kebersihan dan Pengemudi serta alat-alat kebersihan	Rp 300,810,000	Sub.bagian Perencanaan dan Keuangan															
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Presentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	25%	25%	25%	25%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota																				
	Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	25%	25%	25%	25%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Rp 7,858,000															
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Adanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp 3,010,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Adanya pegawai yang di diklatkan berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 1,000,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berta atribut kelengkapan	255 Paket	Tersedianya Pakaian Dinas Satpol PP dan Damkar	Rp -	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 3,848,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	25%	25%	25%	25%	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 427,064,946															
						Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 Paket	Tersedianya komponen Instalasi	Rp 5,000,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11			
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor																			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Rutin Perkantoran	Rp 372,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Tersedianya peralatan rumah tangga	Rp 630,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	768 Dokumen	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 323,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi	Rp 380,856,946	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Tersedia dan tersusunnya arsip dinamis SKPD	Rp 39,883,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 257,875,000																		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Tersedianya Perlengkapan Surat Menyurat seperti Lembar Disposisi, Kendali Surat Masuk & Keluar, Amplop Kop Dinas, Stopmap Logo Dinas danlainnya	Rp 10,875,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 247,000,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian	2,257,000																
	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 185,776,500																		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	Tersedianya biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 164,776,500	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET		
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4					
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20,000,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Telaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1,000,000	Sub.bagian Umum dan Kepegawaian															
Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Prosentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	25%	25%	25%	25%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Rp 5,900,000	Kepala Seksi Linmas															
	Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten per RT	rasio 1,4 per tahun				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Melaksanakan pengamanan Linmas dalam membantu tugas Satpol PP	Rp 642,560,000	Kepala Seksi Linmas															
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Rp 781,454	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini																
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	Mewujudkan Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat	Rp 6,380,000	Kepala Seksi Linmas																
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui	Jumlah orang hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang	mewujudkan peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan	Rp 5,000,000	Kepala Seksi Linmas																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas			Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET				
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4							
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11			
pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap PPNS Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi penegakan hukum Perda dan Perkada dalam satu tahun anggaran.						Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kendal																						
						Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	Adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Rp 5,280,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																	
						Kerjas Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalm Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Adanya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalm Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Rp 6,905,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																	
						Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan	Adanya Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Rp 5,000,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																	
						Pegembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegakan Perda	4 Laporan	Adanya Dokumen Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegakan Perda	Rp 29,225,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																	
Presentase Penurunan Gangguan Trantibum dan Jumlah perda/perkada yang ditegakkan	25%	25%	25%	25%		Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum																						
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota																						
						Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 Laporan	Adanya Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 4,757,500	Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan																	
						Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Dokumen	Adanya dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 3,500,000	Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan																	
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	10 Unit	Adanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Rp 2,752,000	Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan																	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4						
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11		
						Penyimpanan Barang Bukti)			(Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)																		
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	Adanya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 311,330,000	Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan																
						Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70 Laporan	Adanya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 9,250,000	Kepala seksi Pembinaan dan Penyuluhan																
						Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70 Laporan	Adanya Hasil Dokumen Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 8,750,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	Adanya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 7,180,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sesuai SOP	30 laporan	Adanya Dokumen Pelaksanaan Penanganan Atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah sesuai SOP	Rp 550,000,000	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan																
Warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	25%	25%	25%	25%	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Tersedianya dokumen NSPM	Rp 6,245,600	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Kebakaran																
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	365 laporan	Adanya Laporan kegiatan petugas pemadam kebakaran	705,440,000	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Kebakaran																
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket	360 dokumen	adanya dokumen pelayanan	249,500,000	Kepala Seksi Operasional dan																

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3				4	5		6	7	8	9	10												11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Kebakaran dan Non Kebakaran	dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran			pemadaman dan penyelamatan		Pengendalian Kebakaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah Kabupaten Kota dalam Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		3 dokumen	adanya dokumen kerjasama antar daerah terkait kemitraan dalam pecegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	5,000,000	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Kebakaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
							kelaikan standar sarana prasarana proteksi kebakaran																		
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	850 orang	Penyuluhan pencegahan bahaya Kebakaran	182,900,000	Sub Koordinator Seksi Kesiapsiagaan														
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah kelompok balakar yang di bina	20 Desa / Kelurahan	kelompok balakar yang di bina	8,410,000	Sub Koordinator Seksi Kesiapsiagaan														
										Rp 22.075.097.718															

Kendal, 22 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kendal



Drs. BAMBANG DJOKO PITONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199003 1 008

